

MENGEJAR PERINGKAT HDI^{*)} NEGARA-NEGARA DI LINGKUNGAN ASEAN: *BECHMARKING INDONESIA DAN VIETNAM*

Ace Suryadi

Universitas Krisna Dwipayana
(drace@cbb.net.id)

ABSTRACT

This article review the factors that have explained the extent to which magnitude and rank of the Human Development Index of Indonesia had or had not improved in the last 8 year. Within this period, the Indonesia's HDI has been consistently ranked at the 7th position after Vietnam's, and Indonesia has won the race with this country only in 2004 and 2006. Nevertheless, Indonesia has a great potential to manage some measurable improvement through learning from other ASEAN countries' experiences. Vietnam is the immediate choice for Indonesia to benchmark for the future HDI improvement. In the HDI 2007, Indonesia is already in favor in three out of the four indicators used to constitute the composite HDI, such as Literacy, Combine GER, and GDP per-capita, whereas Vietnam only excels in the life expectancy. In the absence of weighting in the process of compositing the index, Indonesia has to accept the fact that its HDI is lower than that of Vietnam. In the future Indonesia needs to be well organized and better coordination in managing HDI improvement affairs to make sure that the right data are timely collected and reported and the better policies on human development are implemented for more effective human development programs.

Keywords: *Angka Harapan Hidup, Angka Melek Aksara, Human Capital, Human Development Index, Manpower Requirement Approach, Partisipasi Pendidikan, Pendapatan Perkapita, Rights Base Approach.*

LATAR BELAKANG

Banyak negara di dunia menilai tidak penting pemeringkatan internasional melalui *Human Development Index* (HDI), yang setiap tahun dikeluarkan oleh United Nation Development Program (UNDP). India misalnya, hampir merasa tidak peduli dengan peringkat HDI yang dicapai negaranya. Hal tersebut dikarenakan di dalam pemeringkatan HDI, India masih menghadapi masalah besar dalam pemerataan dan keadilan dalam bidang-

bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi sebagian besar penduduknya. Bagi negara yang berpenduduk besar seperti India, upaya untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, keaksaraan, kesetaraan gender, dan distribusi pendapatan sangat berat karena membutuhkan program-program yang mahal bagi negara yang pendapatan perkapitanya, sebesar US\$ 3.452, masih di bawah Indonesia itu.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, India mendahulukan upaya untuk memacu peningkatan PDB per-kapita dengan membangun *technology based economy* yang

^{*)} *Human Development Index*

berlaku bagi segmen tertentu penduduknya. India lebih tertarik untuk mengembangkan kualitas manusia India elitis untuk menguasai dan menerapkan teknologi tinggi dalam rangka memacu daya saing dan produktivitas nasional. Walaupun peringkat HDI India cukup rendah (ke-128), namun di balik itu, India sekarang dikenal sebagai negara di Asia Selatan yang ekonominya tumbuh cepat, karena terjadinya *technology push* yang luar biasa yang dapat memacu pertumbuhan produktivitas nasional secara pesat. Bagi India paradigma HDI bukan hanya tidak penting, bahkan tidak relevan untuk membangun ekonomi pada negara yang berpenduduk besar dan masih menghadapi permasalahan angka buta aksara dan kemiskinan di atas 50% itu.

Berbeda dengan India, Indonesia berkomitmen untuk mengejar peringkat HDI yang setinggi-tingginya. Walaupun peringkat HDI Indonesia lebih tinggi daripada India, peringkat HDI Indonesia secara konsisten lebih rendah dari sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya dalam HDI sejak tahun 2000 sampai dengan 2007. Dalam HDI 2007, peringkat HDI dari 6 negara ASEAN berada di atas Indonesia, yaitu Singapura (25), Brunei (30), Malaysia (63), Thailand (78), Philipina (90), dan Vietnam (105). Tabel 1 menunjukkan bahwa di antara 10 negara anggota ASEAN terdapat tiga kelompok negara berdasarkan HDI, yaitu kelompok

negara HDI tinggi (Singapura, Brunei, dan Malaysia); kelompok HDI menengah (Thailand, Philipina, Vietnam, dan Indonesia); dan kelompok HDI rendah (yaitu Lao PDR, Cambodia, dan Myanmar).

Komitmen Pemerintah dalam memperbaiki peringkat HDI dinilai sangat positif karena zaman reformasi, Indonesia pertama kali bangkit kesadarannya untuk membangun manusia Indonesia dengan melakukan *benchmarking* internasional. Hal ini dirasakan sebagai tantangan untuk memacu pengembangan kualitas manusia melalui perluasan, pemerataan, keadilan dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta program-program investasi ekonomi.

HDI merupakan salah satu sarana penting yang digunakan untuk melakukan *benchmarking* secara internasional, khususnya yang langsung berkaitan dengan pendidikan dan kualitas manusia Indonesia. Kabinet Indonesia Bersatu tetap memasang komitmen dan target setinggi mungkin untuk mencapai peringkat yang semakin baik dalam HDI, baik melalui pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun pembangunan dalam berbagai bidang lain khususnya yang menyangkut produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk memacu kesejahteraan masyarakat yang semakin merata dan adil.

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Beberapa Negara, Tahun 2007

No.	Negara	% Penduduk dibawah Garis Kemiskinan		
		Pengeluaran USD1/hari	Pengeluaran USD2/Hari	Kemiskinan Nasional
1	India	34,3	80,4	28,6
2	China	9,9	34,9	4,6
3	Vietnam	Tad	Tad	28,9
4	Indonesia	7,5	52,4	27,1
5	Philipina	14,8	43,0	36,8

Tad = tidak ada data

Sumber: Human Development Report, UNDP 2007

Tabel 2: Perbandingan Rangking HDI di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

NO	NEGARA	TAHUN							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Singapura	24	26	25	28	25	25	25	25
3	Brunei	32	32	32	31	33	33	34	30
4	Malaysia	61	56	59	58	59	61	61	63
5	Thailand	76	66	70	74	76	73	74	78
6	Philipina	77	70	77	85	83	84	84	90
7	Vietnam	108	101	109	109	112	108	109	105
8	Indonesia	109	102	110	112	111	110	108	107
9	Lao PDR	140	131	143	135	135	133	133	130
10	Cambodia	136	121	130	130	130	130	129	131
11	Myanmar	125	118	127	131	132	129	130	132
12	Terendah	174	162	173	175	177	177	177	177

Tertinggi: Canada (2000, 2002-2006), Norway (2001), Iceland (2007)

Terendah: Siera Leone (2000, 2001, 2007), Niger (2002-2006)

Sumber: Human Development Report, UNDP 2007

Philipina dan Vietnam adalah dua negara yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia baik dari GDP perkapitanya maupun indikator-indikator HDI lainnya, namun sejak tahun 2000 sampai 2007, peringkat HDI Philipina selalu lebih tinggi dari Indonesia dan itu terjadi pada semua indikator dan sub-indikator yang digunakan. Vietnam adalah negara yang baru membuka diri dan melaksanakan demokratisasi ekonomi, namun negara itu sekarang tumbuh pesat dan peringkat HDI-nya saling kejar-mengejar dengan Indonesia. Dengan demikian *benchmarking* HDI Indonesia yang paling dekat adalah dengan Vietnam, selanjutnya dengan Philipina dan Thailand, dan lebih lanjut lagi dengan negara HDI tinggi di ASEAN.

Artikel ini dimaksudkan untuk melakukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap HDI dan berbagai indikator dan sub-indikatornya di antara negara-negara ASEAN lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencari jalan terdekat melalui upaya-upaya yang lebih fokus untuk memperbaiki indikator dan sub-

indikator agar secara cepat dan sistematis dapat memperbaiki peringkat HDI Indonesia, melalui *benchmarking* dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, khususnya Vietnam.

“RIGHT BASE APPROACH” DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA

Sejarah pemikiran tentang pendekatan pembangunan terus berkembang, terutama sejak mulai didokumentasikan pada abad ke 18, dan pada waktu itu pemikiran *human capital* (Adam Smith, 1776) mulai diperkenalkan secara lebih sistematis. Pendekatan ini semula masih merupakan sekumpulan preposisi yang menjelaskan bahwa manusia dengan peningkatan keterampilannya akan dapat meningkatkan kesejahteraannya pada tingkatan individu dan dalam kelompok masyarakatnya. Pada awal ditemukannya, teori *human capital* belum memiliki kerangka teori dan metodologi yang sistematis, sehingga hanya menjadi sumber keyakinan yang belum dapat didukung secara empiris.

Tabel 3: Perbandingan HDI Index di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

No	Negara	NILAI HDI PADA TAHUN							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	0.935	0.939	0.942	0.944	0.956	0.963	0.965	0.968
2	Singapura	0.881	0.876	0.885	0.884	0.902	0.907	0.916	0.922
3	Brunei	0.848	0.857	0.856	0.872	0.867	0.866	0.871	0.894
4	Malaysia	0.772	0.774	0.782	0.790	0.793	0.796	0.805	0.811
5	Thailand	0.745	0.757	0.762	0.768	0.768	0.778	0.784	0.781
6	Philipina	0.744	0.749	0.754	0.751	0.753	0.758	0.763	0.771
7	Vietnam	0.671	0.682	0.688	0.688	0.691	0.704	0.709	0.733
8	Indonesia	0.670	0.677	0.684	0.682	0.692	0.697	0.711	0.728
9	Lao PDR	0.484	0.476	0.485	0.525	0.534	0.545	0.553	0.601
10	Cambodia	0.512	0.541	0.543	0.556	0.568	0.571	0.583	0.598
11	Myanmar	0.585	0.551	0.552	0.549	0.551	0.578	0.581	0.583
12	Terendah	0.252	0.258	0.275	0.275	0.273	0.281	0.311	0.336

Sumber: *Human Development Report*, United Nation Development Program, 2007.

Dalam penjabaran teori *human capital*, *International Institute for Educational Planning* (IIEP-UNESCO) mengenalkan metodologi perencanaan pembangunan pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan realistis, yaitu pendekatan permintaan sosial (*social demand approach*). Sistem pendidikan dikelola dan dibangun sebagai jawaban atas permintaan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang semakin meluas, sehingga penambahan fasilitas dan sumberdaya pendidikan dilakukan atas dasar jumlah peserta didik baru. Pada waktu itu konten dan kualitas pendidikan lebih diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan dan belum terdapat standar secara nasional.

Selanjutnya, dikembangkan suatu model perencanaan dan kebijakan pendidikan yang dikenal dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja (*Manpower Requirement Approach* atau MRA). Sistem pendidikan dibangun atas dasar permintaan lapangan kerja akan tenaga terdidik baik dari sisi jumlah maupun jenis dan tingkatan keahlian atau keterampilan tenaga terdidik. Berbagai metodologi dikembangkan untuk melakukan estimasi

berapa banyak permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) tenaga terdidik baik menurut tingkatan pendidikan, jenis dan tingkatan keahlian maupun keterampilan pekerja. Selanjutnya dilakukan analisis pasar (*labor market analysis*) jenis pendidikan mana yang harus diperluas dan mana yang harus diperkecil bahkan dihapuskan sama sekali.

Kegagalan dalam kedua pendekatan di atas, yaitu *Social Demand* dan MRA, telah mendorong para ekonom pendidikan untuk mengembangkan model perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis investasi SDM dengan metodologi yang dikenal dengan "*rate of return to education*". Pendekatan ini menggunakan analisis pasar terhadap nilai pasar dari lulusan pendidikan menurut jenis dan tingkatannya. Dengan catatan, lulusan pendidikan pada jenis dan tingkatan pendidikan yang masih memiliki nilai pasar yang tinggi terus didorong untuk diperluas, dan sebaliknya bagi jenis dan tingkatan pendidikan yang rendah nilai pasarnya.

Masing-masing dari ketiga pendekatan di atas, memiliki kelebihan dan kelemahan

secara struktural sehingga tidak memiliki nilai guna yang komprehensif. Oleh karena itu, dalam perkembangan terakhir beberapa negara maju di kawasan Eropa, Asia dan Amerika telah mengembangkan dan menggunakan pendekatan dalam pembangunan pendidikan yang disebut “*Rights base approach to educational planning and development*”. Pendekatan ini mulai dikenalkan oleh Sen (2000) yang mengatakan bahwa “*The promotion of human development and the fulfillment of human rights are, in many ways, a common motivation, and reflect a fundamental commitment, to promoting the freedom, well being and dignity of individuals in all societies*”

Pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan manusia (*human development*) didasarkan kepada pertanyaan, apakah semua komponen dalam sistem pendidikan di suatu negara telah memberikan pelayanan yang merata dan adil kepada semua segmen masyarakat? Asumsinya adalah, pelayanan yang adil (*equity*) dan merata (*equality*) bagi masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan pendidikan. Pendekatan ini memiliki prinsip-prinsip pemenuhan hal-hak dasar manusia, akuntabilitas, pemberdayaan, partisipasi, dan tidak diskriminatif, yang berlaku dalam berbagai jenis hak dasar yaitu *civil, cultural, economic, and political rights* (Sen, 2000).

Pertama, Pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan seluruh kerangka dalam pembangunan nasional, sehingga melalui pembangunan pendidikan maka pemenuhan hak-hak dasar manusia, bukan hanya hak memperoleh pendidikan tetapi juga hak sipil, hak budaya, hak kesehatan, hak ekonomi, dan hak politik, dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini lebih lanjut dikemukakan oleh Haq (1995) bahwa pembangunan pendidikan terkait dengan kerangka pembangunan secara menyeluruh “*...a development framework with sector that mirror internationally guaranteed rights, e.g.,*

health, education, housing, justice and personal security, and political consideration”

Kedua, *Rights based approach* (RBA) dapat meningkatkan tingkatan akuntabilitas yang tinggi dalam proses pembangunan, dengan memfungsikan peran-peran masyarakat yang dilayani sebagai *claim holder* di satu pihak dan fungsi pemberi pelayanan atau yang disebut *duty holder* di pihak yang lain. *Duty holder* mempunyai kewajiban untuk melindungi, memajukan, memberikan fasilitas, atau menghindari kekerasan serta diskriminasi kepada *claim holder*, dan oleh karena itu *claim holder* dapat menuntut hak-haknya yang secara internasional telah dilindungi. Pendekatan RBA menjamin penggunaan standar secara internasional sebagai *benchmark* yang dapat diterjemahkan ke dalam aksi-aksi lokal dan untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional di berbagai sektor terkait, sehingga akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas.

Ketiga, RBA bertujuan memberikan kekuatan, kemampuan serta akses yang merata dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi hak mereka, RBA menekankan pada *human person* dengan segala hak-hak yang melekat padanya sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan, dalam rangka meningkatkan kapabilitas mereka sehingga dapat mempengaruhi perubahan dalam kehidupan mereka. RBA adalah pendekatan pembangunan pendidikan yang dapat menjamin terjadinya peningkatan pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat secara berkelanjutan, melalui berbagai strategi pemberdayaan yang akurat dan jitu. RBA memfokuskan pada masyarakat yang dilayani (*beneficiaries*) sebagai pemilik hak sekaligus juga sebagai pemberi arah dalam proses pembangunan sehingga tolok ukur utamanya adalah kepuasan para *beneficiaries* tersebut dalam memperoleh hak-hak mereka.

Keempat, penerapan model RBA dalam pembangunan manusia memerlukan tingkat partisipasi yang luas dari masyarakat, *civil*

society, kaum minoritas, penduduk asli yang terkena dampak, kaum perempuan dalam kesetaraan jender, dan sebagainya. Partisipasi tersebut harus lebih bersifat aktif, bebas dan bermanfaat bagi pembangunan manusia itu sendiri. Konsep partisipasi lebih dari hanya sekadar keikutsertaan masyarakat yang bersifat seremonial, tetapi juga yang lebih penting adalah inisiatif dari berbagai segmen masyarakat termasuk kaum minoritas dalam menentukan, merencanakan, melaksanakan, serta mengontrol pelaksanaan program-program pembangunan manusia. Dalam RBA, partisipasi harus diarahkan pada isu-isu aksesibilitas masyarakat terhadap proses pembangunan, terhadap berbagai institusi, terhadap informasi yang berguna, dan adanya mekanisme yang jelas untuk penyampaian keluhan-keluhan dalam masyarakat.

Kelima, penerapan RBA harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat non-diskriminasi sehingga setiap segmen masyarakat yang mendapat pelayanan memperoleh perlakuan yang adil dan merata dalam pembangunan manusia. Dalam RBA perhatian yang khusus perlu dipusatkan pada pemerataan dan keadilan dalam memperoleh pelayanan melalui program-program pembangunan manusia. Pemerataan (*equality*) adalah bahwa setiap segmen masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan dan akses yang sama terhadap berbagai institusi pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, pelayanan sosial, dan sejenisnya. Keadilan (*equity*) adalah keseimbangan dalam memperoleh pelayanan dan perlakuan yang adil sesuai dengan kemampuan dan permasalahan masing-masing. Keadilan belum tentu menunjukkan kesamaan dalam perlakuan, sehingga untuk mencapai keadilan dalam pelayanan dan pembangunan manusia, program-program pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial harus divariasikan untuk menjamin bahwa akhirnya dapat diperoleh *output* yang sama.

Dalam *Human Development Report* (UNESCO, 2007) dijelaskan bahwa *Human Development Indeks* (HDI) merupakan suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to human development*. HDI melakukan pengukuran rata-rata capaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran itu dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar, bahwa manusia yang berkualitas adalah:

- ❑ manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*);
- ❑ manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi APK pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan; dan
- ❑ manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per-kapita yang menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP) yang dihitung dalam dollar Amerika Serikat.

METODOLOGI DALAM PEMERINGKATAN HDI

Human Development Index (HDI) adalah ukuran yang menggunakan angka harapan hidup, melek aksara, pendidikan, dan standar hidup dalam bentuk indeks komposit (*composite index*) dari beberapa indikator yang relevan dan diberlakukan bagi negara-negara di seluruh dunia. HDI menetapkan standar-standar yang dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran kualitas hidup kemanusiaan (*the means of measuring well-being*) khususnya menyangkut kesejahteraan anak-anak. Standar-standar HDI digunakan untuk mengukur dan menentukan apakah

suatu negara itu dapat diidentifikasi sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara belum berkembang. Standar itu juga dapat digunakan untuk mengukur dampak dari kebijakan ekonomi pada masing-masing negara terhadap peningkatan kualitas hidup bagi seluruh anggota masyarakatnya.

Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih Hadiah Noble berkebangsaan India Amartya Sen, dan seorang ekonom dari Pakistan Mahbub ul Haq, yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Indeks ini telah digunakan sejak tahun 1990 oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam bentuk laporan tahunan UNDP (*Annual Human Development Report*) yang dipersembahkan untuk kemanusiaan di planet ini. Sen menyatakan bahwa HDI adalah sebuah pengukuran indeks kualitas manusia yang “cukup kasar” (*vulgar measure*) karena memang banyak keterbatasannya. Namun, HDI menerapkan ukuran pada aspek-aspek pengembangan kualitas manusia secara lebih komprehensif daripada hanya sekadar pendapatan per-kapita seperti yang dilakukan selama ini dalam menentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu negara maju, berkembang, atau belum berkembang. HDI juga merupakan salah satu bahan kajian atau topik bahasan bagi para peneliti untuk meneliti ukuran-ukuran kualitas manusia di sebuah negara secara lebih luas dan beragam, yang bersumber dari laporan tahunan, yaitu *Human Development Reports* ini.

Setiap tahun, setiap anggota negara PBB melaporkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan pengukuran terhadap indikator-indikator yang relevan, selanjutnya berdasarkan metodologi yang dikembangkan, negara-negara tersebut didaftar dan dirangking berdasarkan indeks HDI yang diproses melalui komposit dari nilai-nilai indikator-indikator dimaksud. Jika menurut nilai-nilai indikator yang telah diolah dan dikompositkan menun-

jukan suatu negara memperoleh indeks HDI yang tinggi, maka negara tersebut akan memperoleh peringkat HDI yang tinggi pula atau sebaliknya. Jika sebuah negara memperoleh peringkat yang tinggi dan terus meningkat, seringkali negara itu menjadi terkenal dan *prestigious* dan dapat menarik para imigran yang cakap untuk berkunjung atau bekerja sehingga menjadi *human capital* bagi negara tersebut, sehingga dapat mendorong negara itu semakin maju dan berkembang secara teknologi, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya.

Secara umum, metodologi HDI mentransformasikan nilai dari sebuah variabel dan dari sebuah negara, misalnya variabel x , untuk dijadikan sebagai sebuah besaran bebas dalam bentuk indeks (*unit free index*) yang nilainya mulai dari 0 s/d 1, agar memungkinkan untuk dilakukan penjumlahan satu sama lain dalam bentuk besaran indeks gabungan (*composite index*), dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{indeks} - x = \frac{X - \text{Min}(X)}{\text{Maks}(X) - \text{Min}(X)}$$

Maks (X) dan Min (X) adalah nilai terendah dan tertinggi sesuatu variabel dapat mencapai dalam ukuran ideal atau tidak sama sekali.

Human Development Index (HDI) adalah rata-rata dari suatu indeks gabungan (*composite indices*) dari besaran masing-masing indeks tiga indikator (dan sub indikator) sebagai berikut.

1. Indeks Harapan Hidup (IHH) = $\frac{HH - 25}{85 - 25}$
2. Indeks Pendidikan = $\frac{2}{3} \times \text{IKD} + \frac{1}{3} \times \text{IPK}$
 - Indeks Melek Aksara Dewasa ($IMAD$) = $\frac{AMAD - 0}{100 - 0}$

- Indeks Gabungan Partisipasi Kasar

$$(IGPK) = \frac{APK(Gab) - 0}{100 - 0}$$

3. Indeks Pendapatan Domestik Bruto per-kapita (IPDBpk)

$$IPDBpk = \frac{\log(PDBpk) - \log(100)}{\log(40000) - \log(100)}$$

Singkatan angka, rasio, dan indeks yang digunakan dalam formula tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. HH adalah Harapan Hidup Waktu Lahir, ($LE=Life Expectancy at Birth$); IHH adalah Indeks Harapan Hidup; AHH adalah Angka Harapan Hidup waktu lahir; AMAD adalah Angka Melek Aksara Dewasa usia 15 tahun ke atas ($ALR= Adult Literacy Rate Ages 15 and Older$)
2. IGPK adalah Indeks Gabungan Partisipasi Kasar ($CGER= Combined Gross Enrolment Ratio for Primary, Secondary and Tertiary Schools$); APK(Gab) adalah gabungan APK pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi)
3. PDBpk adalah PDB per-kapita yang menggunakan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) dalam dollar Amerika Serikat ($GDPpc= GDP per capita at PPP in USD$)

Uraian singkat konsep dan metodologi ini menggambarkan bagaimana HDI ini dikonsepsikan dan data-data indikator yang digunakan dalam HDI diproses sehingga menjadi besaran-besaran indeks dan pemeringkatan Negara dalam pengembangan manusia di negara masing-masing. Berdasarkan rata-rata nilai indikator yang dijadikan besaran indeks hasil olahan, maka HDI secara umum merupakan indikator perluasan dan pemerataan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu HDI merupakan indeks pengembangan manusia dari sisi perluasan, pemerataan dan keadilan tetapi sama sekali bukan dalam ukuran-ukuran kualitas. Nilai indeks yang tinggi yang diperoleh suatu negara dalam

bidang pendidikan, misalnya, lebih menunjukkan bahwa pendidikan di negara itu lebih merata dan meluas, dan sama sekali tidak mengukur bahwa pendidikan di negara tersebut bermutu tinggi.

PERINGKAT HDI: INDONESIA DAN VIETNAM

Indonesia pernah menetapkan target untuk mengejar peringkat HDI agar lebih tinggi dari peringkat HDI Vietnam karena peringkat HDI Indonesia sejak tahun 2000 s/d 2003 selalu lebih rendah dari Vietnam, selanjutnya Indonesia dan Vietnam saling kejar dan Indonesia sempat lebih tinggi pada tahun 2004 dan 2006. Namun demikian, pada tahun 2007 peringkat HDI Indonesia turun lagi menjadi peringkat 107, atau dua peringkat lebih rendah dari Vietnam, peringkat 105. Perkembangan ini cukup menarik, perjuangan Indonesia untuk mengejar HDI Vietnam tampaknya tidak akan terlalu sulit karena perbedaan nilai indikator maupun indeksnya tidak terlalu jauh dan Indonesia bahkan pernah lebih tinggi pada tahun 2004 dan 2006.

Untuk mengetahui mengapa peringkat HDI Indonesia lebih rendah atau lebih tinggi dari peringkat HDI Vietnam, perlu dilakukan telaah yang lebih dalam pada indeks masing-masing indikator yang digunakan dalam indeks komposit HDI, yaitu indeks harapan hidup (*life expectancy index*), indeks pendidikan (*education indeks*), dan indeks PDBpk (*GDPpc Index*) sebagaimana dijelaskan dalam metodologi perhitungan di atas. Pada tahun 2007, HDI Indonesia adalah 0,728 < dari HDI Vietnam yaitu 0,733, atau terpaut 0,005 poin. Walaupun perbedaan ini sangat tipis, tetapi peringkat Indonesia berada dua basis poin di bawah Vietnam, sehingga setelah diurutkan dalam peringkat seolah-olah sangat jauh perbedaannya.

Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa penyamaan bobot dalam indeks HDI setiap negara dan sub-indeks masing-masing indikator mengandung potensi ketidakadilan

dalam perbandingan HDI. Nilai HDI tersebut merupakan rata-rata dari gabungan tiga sub-indeks, yaitu penambahan sub-Indeks Harapan Hidup (IHH), sub-Indeks Pendidikan (IP), dan sub-Indeks PDB per-kapita (IPDBpk) dibagi tiga. Ketiga sub-indeks tersebut memiliki bobot yang sama sehingga nilai gabungan indeks tersebut cukup dibagi tiga saja. Hal ini kurang adil karena pemerinkatan HDI sama sekali tidak memperhitungkan perbedaan dalam kerumitan struktural (*structural complexity*) yang dihadapi oleh masing-masing negara, baik kerumitan demografis (*demographical complexity*), kerumitan spasial (*spatial complexity*), maupun kerumitan lainnya. Kerumitan tersebut perlu diperhitungkan, karena harga setiap unit dalam besaran indeks pendidikan di Indonesia tentu tidak sama dengan Vietnam, karena kerumitan atau keragaman wilayah kedua Negara itu berbeda sehingga mengandung implikasi terhadap intensitas perjuangan dan oleh karena itu harganya juga berbeda pula.

Sama halnya, derajat kompleksitasnya akan berbeda antara masing-masing indikator (dan sub-indikator) yang dijadikan sub-indeks dalam HDI. Sektor pendidikan dan sektor kesehatan, misalnya, juga akan berbeda kerumitannya dalam pembangunan sektor masing-masing. Setiap unit dalam besaran indeks di bidang pendidikan akan berbeda kerumitan dan "harganya" dengan setiap unit dalam besaran indeks kesehatan, sehingga pembobotan juga diperlukan dalam menghasilkan komposit indeks dari sub-indeks pendidikan dan sub-indeks kesehatan. Ketidakadilan dalam penyamaan bobot ini akan semakin kentara bahwa negara berpenduduk sedikit dan tidak memiliki kompleksitas wilayah akan jauh lebih mudah mencapai peringkat HDI tinggi ketimbang negara berpenduduk besar dan memiliki kompleksitas wilayah tinggi. Dengan demikian, Vietnam akan memiliki kemudahan yang jauh lebih besar dalam mencapai HDI tinggi ketimbang Indonesia.

Ketidakadilan tersebut terlihat dari Tabel 4, Indonesia unggul dalam dua indeks yaitu indeks pendidikan ($0,830 > 0,815$) dan indeks PDBpk ($0,609 > 0,572$), sementara itu Vietnam hanya unggul dalam satu Indeks saja yaitu indeks Harapan Hidup ($0,812 > 0,745$), namun HDI Indonesia tetap lebih rendah dari HDI Vietnam karena ketiga sub-indeks tersebut memiliki bobot yang sama. Dengan demikian kemenangan Indonesia dalam dua sub-indeks yaitu pendidikan dan PDBpk, yang seharusnya jauh lebih tinggi nilai bobotnya karena rumit dan mahal ketimbang satu indeks Harapan Hidup, tidak menghasilkan HDI yang tinggi karena tidak dilakukan pembobotan yang sesuai dengan kerumitan dan harga satuannya dalam membangun masing-masing sektor. Dengan tidak adanya pembobotan dalam masing-masing sub-indeks ini maka Vietnam lebih diuntungkan dalam perhitungan HDI ketimbang Indonesia.

Jika dilihat secara lebih detail lagi, kejanggalan lebih kentara jika dilihat nilai indikatornya masing-masing. Dari empat indikator HDI yang digunakan, Indonesia unggul dalam tiga indikator sekaligus, yaitu Angka Melek Aksara yang terpaut 0,1 persen ($90,4 > 0,90,3$), APK Gabungan yang terpaut 4,3 persen ($68,2 > 63,9$), dan Angka PDB yang terpaut US\$ 772,0 ($US\$3.843 > US\3.071), sedangkan Vietnam hanya unggul dalam satu indikator, yaitu Angka Harapan Hidup yang terpaut empat angka ($73,7 > 69,7$). Jika kita belajar untuk memacu perbaikan peringkat HDI untuk mengejar Vietnam, maka sektor pendidikan dan sektor ekonomi sudah cukup berhasil dalam melakukan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dan kesempatan berusaha sehingga dapat mengungguli Vietnam. Oleh karena itu yang perlu dilakukan lebih keras lagi dan ditempatkan dalam skala prioritas tertinggi, dalam upaya-upaya sebagai berikut:

Tabel 4: Perbandingan Indeks HDI dan Indeks Indikator HDI Di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2007

No.	Negara	HDI	Indeks Masing indicator		
			Hrp Hidup	Pendidikan	GDP
1	Iceland	0.968	0.941	0.978	0.985
2	Singapura	0.922	0.907	0.908	0.950
3	Brunei	0.894	0.862	0.877	0.941
4	Malaysia	0.811	0.811	0.839	0.783
5	Thailand	0.781	0.743	0.655	0.745
6	Philipina	0.771	0.757	0.888	0.657
7	Vietnam	0.733	0.812	0.815	0.572
8	Indonesia	0.728	0.745	0.830	0.609
9	Lao PDR	0.601	0.637	0.663	0.503
10	Cambodia	0.598	0.550	0.691	0.552
11	Myanmar	0.583	0.596	0.764	0.389
12	Terrendah	0.336	0.280	0.381	0.348

Sumber: *Human Development Report*, UNDP 2007

Pertama, pembangunan sektor kesehatan perlu dilakukan secara lebih efisien untuk memacu peningkatan Angka Harapan Hidup dalam waktu yang relatif singkat karena indeks kesehatan Indonesia terkalahkan oleh Vietnam setiap tahun sejak tahun 2000. Sektor kesehatan diurus oleh salah satu Departemen yang melaksanakan pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat, dan salah satu Departemen yang memperoleh anggaran paling besar setelah Pendidikan, Pekerjaan Umum, Pertahanan, dan Departemen Agama. Dengan demikian, konsentrasi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan massal sangat diperlukan untuk memacu peningkatan angka harapan hidup.

Kedua, adalah peningkatan angka melek aksara secara lebih intensif lagi karena angka melek aksara merupakan *push factor* yang

sangat signifikan dalam peningkatan HDI. Berdasarkan metodologi HDI, sub-indikator melek aksara memiliki bobot 2/3 sedangkan sub-indikator APK(Gab) memiliki bobot 1/3 dalam menghitung sub-indeks pendidikan. Peningkatan melek aksara perlu memperhatikan prioritas pada kantong-kantong buta aksara yang masih cukup meluas, terutama di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, agar memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perbaikan sub-indeks pendidikan. Di samping itu, perluasan pendidikan keaksaraan dasar perlu dilanjutkan dengan pendidikan keaksaraan fungsional (*functional literacy*) dan keaksaraan mandiri (*advance literacy*) untuk memberikan kecakapan bekerja bagi para aksarawan baru, sehingga akan menjadi *push factor* juga dalam peningkatan PDBpk.

Tabel 5: Perbandingan Nilai Indikator untuk Menghitung HDI di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2007

No	Negara	Prkt HDI	Nilai HDI	Nilai Indikator			
				AHH	AMAD	Gab APK	GDPpk
1	Tertinggi	1	0.968	81,5	99,9	95,4	36,510
2	Singapura	25	0.922	79,4	92,5	87,3	29,663
3	Brunei	30	0.894	76,7	92,7	77,7	28,151
4	Malaysia	63	0.811	73,7	88,7	74,3	10,882
5	Thailand	78	0.781	69,5	98,6	73,7	8,677
6	Philipina	90	0.771	71,0	92,6	81,1	5,137
7	Vietnam	105	0.733	73,7	90,3	63,9	3,071
8	Indonesia	107	0.728	69,7	90,4	68,2	3,843
9	Lao PDR	130	0.601	63,2	68,7	61,5	2,039
10	Cambodia	131	0.598	58,0	73,6	60,0	2,727
11	Myanmar	132	0.583	60,8	89,9	49,5	1,027
12	Terrendah	177	0.336	41,8	34,8	44,6	806

Sumber: *Human Development Report*, UNDP 2007

Ketiga, adalah melanjutkan dan lebih mengintensifkan lagi perluasan dan pemerataan pendidikan dasar hingga mendekati 100 persen APK dalam waktu tiga tahun ke depan. Dalam waktu-waktu selanjutnya, perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian walaupun tidak menggunakan pendekatan wajib belajar (*compulsory education*) untuk memacu peningkatan APK(Gab). Perluasan dan pemerataan pada pendidikan menengah dan tinggi perlu dilakukan pada pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan politeknik, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dalam rangka meningkatkan *employability* para lulusannya, sehingga dalam waktu dekat dapat juga memacu peningkatan PDBpk. Pendidikan keaksaraan (*literacy education*) perlu diterapkan melalui pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tingkatannya masing-masing, agar kecakapan hidup dan *employability* lulusan pendidikan juga semakin meningkat, dan pada gilirannya

akan dapat meningkatkan PDBpk secara signifikan.

PERKEMBANGAN INDEKS DAN SUB-INDEKS HDI: ANALISIS SENSITIVITAS

a. Sub-Indeks Harapan Hidup (IHH)

Dapat dipastikan dari Tabel 6 bahwa harapan hidup sejak lahir penduduk Vietnam rata-rata lebih tinggi daripada penduduk Indonesia, dan ini terjadi sejak tahun 2000 (data 1998) sampai dengan tahun 2007 (data 2005). Dengan demikian, dilihat dari data Tabel 6, terlihat bahwa indeks harapan hidup Indonesia tidak pernah memberikan kontribusi terhadap peningkatan HDI Indonesia paling tidak sejak tahun 1998, data yang digunakan untuk menghitung HDI tahun 2000, sampai dengan tahun 2005, data yang digunakan untuk menghitung HDI tahun 2007. Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2000 s/d tahun 2007, perbedaan rata-rata angka harapan hidup (AHH) Indonesia dan Vietnam tidak semakin sempit tetapi semakin melebar. Sejak tahun 2000-2005, perbedaan rata-rata AHH

Indonesia Vietnam terpaut 2 tahun, pada tahun 2006 terpaut 3 tahun, dan pada tahun 2007 terpaut 4 tahun. Sama halnya jika dilihat dari perkembangan indeks harapan hidup (IHH), berdasarkan Tabel 6, dalam kurun waktu 2000-2003, IHH Indonesia-Vietnam terpaut 3 angka, selanjutnya tahun 2004 dan 2005 terpaut 3 angka, dan pada 2006 dan 2007 terpaut semakin besar yaitu 6 angka. Dengan demikian menurut ukuran HDI, pembangunan sektor kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat tampak tidak semakin baik, tetapi bahkan setiap tahun semakin memberikan sumbangan negatif terhadap peningkatan HDI.

Kekalahan Indonesia dari Vietnam dalam indeks harapan hidup (IHH) cenderung lebih bersifat struktural, yang menunjukkan bahwa secara alamiah penduduk Vietnam rata-rata lebih panjang usianya daripada rata-rata usia penduduk Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan oleh dua faktor penting. *Faktor pertama*, faktor kesehatan sebagai variabel yang dapat dirubah (*malleable factors*) dalam waktu yang lebih singkat, melalui intervensi pembangunan dan program-program pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih meluas, merata, dan berkeadilan. Namun, rata-rata panjang usia ini juga bisa dijelaskan oleh *faktor kedua*, yaitu faktor yang sulit dirubah (*unmaleable factors*) oleh kebijakan pemerintah dalam waktu

singkat, seperti faktor cuaca, pola makanan dan minuman tradisional, keadaan alam, sumber makanan dan minuman penduduk, serta kebiasaan masyarakat tertentu yang mempengaruhi panjangnya usia bagi penduduk.

Jika faktor pertama (*maleable factors*) lebih dominan pengaruhnya, maka peningkatan indeks harapan hidup dapat dikendalikan oleh program-program pemerintah yang relevan, dan oleh karena itu peningkatan angka harapan dapat ditingkatkan secara sistematis melalui intervensi pembangunan sektor kesehatan serta program-program pelayanan kesehatan masyarakat. Namun jika faktor kedua (*unmaleable factors*) yang lebih berpengaruh maka perbedaan angka harapan hidup Indonesia dan Vietnam telah terjadi secara struktural, sehingga akan berlangsung lebih lama, sehingga dengan kata lain faktor kesehatan dan angka harapan hidup sulit untuk bisa diharapkan dapat memacu HDI Indonesia dalam waktu cepat. Jika itu benar, maka perbaikan HDI dalam waktu cepat hanya dapat diharapkan melalui perbaikan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, antara lain melalui pemberantasan buta aksara secara lebih intensif lagi, perluasan akses pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta program-program investasi ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Tabel 6: Perbandingan Indonesia dan Vietnam dalam Indeks dan Indikator Harapan Hidup dalam HDI, 2007

No.	Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Indeks Harapan Hidup								
	Vietnam	0.71	0.71	0.72	0.73	0.69	0.76	0.76	0.812
	Indonesia	0.68	0.68	0.69	0.69	0.73	0.70	0.70	0.745
2	Angka Harapan Hidup								
	Vietnam	67.8	67.8	68.2	68.6	69.0	70.5	70.8	73.7
	Indonesia	65.6	65.8	66.2	66.2	66.6	66.8	67.2	69.7

Sumber: *Human Development Report*, UNDP 2007

b. Sub-Indeks Pendidikan

Sumbangan sub-indeks pendidikan sebagai dampak dari pembangunan sektor pendidikan baik melalui peningkatan melek aksara (*literacy*) maupun melalui perluasan layanan dan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, terhadap perbaikan HDI cukup besar dan nyata. Besaran Indeks Pendidikan Indonesia terus meningkat setiap tahun secara signifikan, khususnya dalam dua tahun terakhir. Menurut Tabel 7, dalam enam tahun sejak tahun 2000 indeks pendidikan Indonesia selalu di bawah Vietnam, namun pada tahun 2006 dan 2007 indeks pendidikan Indonesia dapat "menyalip" Vietnam dengan perbedaan yang cukup besar.

Peningkatan ini menunjukkan adanya konsistensi antara komitmen pemerintah dalam memperbaiki peringkat HDI dengan program-program perluasan layanan dan akses pendidikan secara adil dan merata. Hasilnya sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang telah menyumbang secara signifikan terhadap peningkatan peringkat HDI dari peringkat 108 (2006) menjadi peringkat 107 (2007). Namun, oleh karena indeks harapan hidup sangat besar "daya hambat"-nya maka peningkatan HDI dari tahun 2006 ke 2007 belum cukup tinggi dan belum mampu untuk melampaui peringkat HDI Vietnam. Walhasil, kita masih tetap harus "mengelus dada" akan

kekalahan tanding dalam peringkat HDI melawan Vietnam di penghujung tahun 2007, sekaligus menunjukkan bahwa kita belum mampu mempertahankan kemenangan yang sempat diraih pada tahun 2004 dan 2006 "melawan" Vietnam.

Sejalan dengan indeks pendidikan di atas, dalam indikator angka melek aksara dewasa, terlihat perkembangan yang cukup menarik dan cukup membuat Indonesia semakin optimis. Sejak tahun 2000 s.d tahun 2005 angka melek aksara Indonesia selalu di bawah Vietnam namun dalam dua terakhir angka melek aksara Indonesia dapat menyalip Vietnam walaupun perbedaan angkanya tidak besar. Dalam enam tahun pertama angka melek aksara Vietnam lebih tinggi dan rata-rata terpaut antara 1-3 persen, pada tahun 2006 dan 2007 melek aksara Indonesia terus meningkat dan dapat menyalip Vietnam walaupun hanya terpaut 0,1 persen saja. Namun, walaupun kecil perbedaan angkanya Indonesia memiliki modal awal yang cukup besar untuk selanjutnya dapat mengungguli Vietnam dalam peningkatan angka melek aksara, terutama dengan keluarnya INPRES No. 5/2006 tentang "**Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara**".

Tabel 7: Perbandingan Indonesia dan Vietnam dalam Indeks dan Indikator Pendidikan dalam HDI, 2007

No.	Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Indeks Pendidikan								
	Vietnam	0.83	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.815
	Indonesia	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.83	0.830
2	Agka Melek Aksara Dewasa								
	Vietnam	92.9	93.1	93.4	92.7	90.3	90.3	90.3	90.3
	Indonesia	85.7	86.3	86.9	87.3	87.9	87.9	90.4	90.4
3	APK Gabungan Dikdas, Dikmen dan Dikti								
	Vietnam	63	67	67	64	64	64	63	63.9
	Indonesia	65	65	65	64	65	66	68	68.2

Sumber: *Human Development Report*, UNDP 2007

Gerakan ini telah mampu memacu partisipasi seluruh tingkatan pemerintahan, berbagai komponen masyarakat termasuk organisasi perempuan, organisasi keagamaan, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat secara luas untuk melaksanakan pemberantasan buta aksara, serta perluasan akses wajar dikdas sembilan tahun yang jika berhasil akan secara otomatis memacu angka melek aksara secara nasional.

Dalam APK(Gab) Pendidikan Dasar, menengah dan tinggi, sumbangan indeks pendidikan juga sangat besar dan nyata terhadap perbaikan peringkat HDI. Walaupun dalam empat tahun pertama APK pendidikan Indonesia selalu berada di bawah APK(Gab) pendidikan Vietnam, namun pada tahun 2003 sama, dan sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 APK(Gab) pendidikan Indonesia telah mengungguli Vietnam. Perbedaan angkanya cukup signifikan dan meningkat setiap tahunnya, yaitu terpaut 1 persen pada tahun 2004, 2 persen pada tahun 2005, dan 5 persen pada dua tahun terakhir. Perbedaan yang cukup besar inilah yang telah mempengaruhi kenaikan peringkat HDI dari 108 (HDI 2006) menjadi 107 (HDI 2007), walaupun memang belum cukup mampu mengalahkan peringkat HDI Vietnam yang naik dua angka dalam peringkat HDInya.

Jika dilihat secara lebih cermat lagi, kenaikan indeks pendidikan yang cukup tinggi tetapi belum mampu mengalahkan Vietnam dalam peringkat HDI 2007, di samping karena ketidakadilan dan pembobotan seperti yang dijelaskan di muka, juga karena faktor yang terjadi dalam sistem pendataan di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perhitungan HDI yang dilakukan setiap tahun menggunakan data yang dikirimkan oleh setiap negara anggota PBB berdasarkan data yang diisikan ke dalam kuesioner elektronik. Pengalaman selama ini menunjukkan penghitungan HDI setiap tahun selalu menggunakan data dua tahun sebelumnya. Jadi, misalnya, Angka Melek

Aksara (*literacy ratio*) Indonesia dalam HDI 2007 sebesar 90,4 bukan data tahun 2007, tetapi merupakan keadaan pada tahun 2005. Jadi, jika data yang digunakan adalah data tahun 2006, maka angka melek aksara (*literacy rate*) akan lebih tinggi lagi yaitu 91,9, lebih tinggi lagi jika menggunakan basis data 2007, yaitu 92,8. Jika menggunakan basis data 2006 atau 2007, maka Indeks Melek Aksara Dewasa (IMAD) Indonesia akan jauh lebih tinggi lagi. Jadi dapat dipastikan bahwa indeks pendidikan Indonesia akan lebih tinggi lagi dalam HDI 2008 dan 2009, karena sudah menggunakan data capaian tahun 2006 dan 2007. Jika Vietnam dan Philipina tidak seperti Indonesia melaksanakan GN-PPBA (Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara), maka HDI Indonesia akan lebih merangkak naik akibat dari peningkatan cepat dalam angka melek aksara dewasa.

Kedua, hal yang sama akan terjadi jika dalam perhitungan indeks pendidikan menggunakan APK(Gab) dengan basis data 2006 dan 2007, karena dalam dua tahun terakhir ini Indonesia melaksanakan percepatan dalam perluasan akses pendidikan yang luar biasa, khususnya pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP atau sederajat). Jadi, jika APK Gabungan menggunakan basis data tahun 2006, maka Gabungan APK persentasenya akan lebih besar lagi, apalagi jika menggunakan data 2007, angkanya akan jauh lebih meningkat. Jika percepatan perluasan ini hanya terjadi di Indonesia, maka indeks HDI Indonesia akan lebih cepat lagi meningkat dibandingkan dengan Vietnam bahkan mungkin Philipina.

Ketiga, dalam menghitung HDI untuk Indonesia, UNDP menggunakan data BPS, termasuk angka melek aksara dewasa dan APK(Gab) pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam perhitungan APK SMP pada pertengahan tahun 2007, misalnya, data BPS, yang menggunakan pendataan dengan metoda *sampling*, menunjukkan angka 84 persen, sedangkan perhitungan Depdiknas dan Depag berdasarkan laporan administratif hasil

pembangunan, menunjukkan angka 88,67 persen, jadi terpaut sekitar 4,7 persen. *Underestimasi* dalam data BPS ini disebabkan karena Susenas tidak memasukan pendidikan kesetaraan (Paket B) ke dalam definisi pendidikan dasar. Jadi data peserta didik Paket B, yang jumlahnya lebih dari 2 juta peserta didik itu, tidak dihitung sebagai peserta didik pendidikan dasar. Jika ini terus dilakukan, maka APK(Gab) akan tetap rendah, sehingga indeks pendidikan juga akan dihitung rendah, sehingga pada gilirannya akan selalu menempatkan Indonesia dalam peringkat HDI yang rendah pula. *Underestimasi* ini bukan tidak mungkin terjadi juga dalam pendataan kesehatan, dan pendapatan per-kapita.

c. Sub-Indeks PDB per-kapita (PDBpk)

Seperti terlihat pada Tabel 8, sumbangan indeks PDBpk terhadap HDI masih sangat kecil walaupun posisi Indonesia jauh lebih tinggi di atas Vietnam. Jika dibandingkan dengan Philipina dan Thailand saja, PDBpk Indonesia sangat rendah dan kurang mengembirakan, apalagi jika dibandingkan dengan negara ASEAN kelompok HDI tinggi: Singapura, Brunei dan Malaysia, terlalu jauh HDI negara-negara itu untuk bisa dikejar. Namun demikian, untuk mengejar Vietnam saja, Indonesia seharusnya tidak akan menemui kesulitan yang berarti karena Indonesia sudah lebih unggul dalam indikator PDBpk sebagai indikator terberat (termahal) itu.

Meskipun demikian, Indonesia perlu bekerja keras untuk mempertahankan posisi PDBpk relatif terhadap PDBpk Vietnam. Dilihat dari perkembangan per tahun sejak 2000, memang PDBpk Indonesia selalu lebih tinggi daripada PDBpk Vietnam, namun setiap tahun berikutnya selisih PDBpk tampak semakin sempit. Pada tahun 2000, PDB Vietnam berada pada *percentile* ke-64 (PDBpk Vietnam dibagi PDBpk Indonesia), selisihnya semakin sempit setiap tahun hingga PDB Vietnam mencapai *percentile* ke-80 tahun 2007. Pada tahun 2007, PDBpk Vietnam (USD3.071) masih berada di bawah Indonesia (USD3.843), namun jika kecepatan pertumbuhan ekonomi Vietnam dan Indonesia diasumsikan konstan, maka Vietnam diperkirakan akan "menyalip" Indonesia dalam waktu dalam 9 tahun ke depan, atau pada tahun 2016.

Pendapatan perkapita Vietnam dengan Indonesia yang semakin menyempit ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih cepat dan semakin meningkat kecepatannya (*rate of growth*) ketimbang kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mempertahankan keadaan sekarang atau bahkan memperlebar selisih PDBpk Indonesia di atas PDBpk Vietnam, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dipacu agar lebih cepat lagi sehingga menghasilkan PDBpk yang selalu berada di atas Vietnam. Untuk itu maka paradigma pembangunan ekonomi Indonesia harus dikaji ulang, terutama dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam standar HDI, yaitu mene-

Tabel 8: Perbandingan Indonesia dan Vietnam dalam Indeks dan Indikator PDB Per-kapita dalam HDI, 2007

No.	Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	PDB Perkapita (PPP dan USD)								
	Vietnam	1,689	1,860	1,996	2,070	2,300	2,490	2.745	3,071
	Indonesia	2,651	2,857	3,043	2,940	3,230	3,361	3,609	3,843
2	Indeks PDB Perkapita								
	Vietnam	0,47	0,49	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57
	Indonesia	0,55	0,56	0,57	0,56	0,58	0,59	0,60	0,61

Sumber: *Human Development Report*, UNDP 2007

kankan pada demokratisasi dan liberasi di berbagai bidang. Vietnam adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan pendekatan yang disebut *right based approach to economic development* yaitu membangun ekonomi melalui pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara merata dan adil. Berdasarkan pengamatan Amartia Sen, pendekatan itu telah berhasil mewujudkan liberasi ekonomi, pendidikan, dan program-program sosial lainnya untuk menciptakan kondisi pertumbuhan cepat. Berdasarkan pengalaman Vietnam, pertumbuhan ekonomi yang cepat itu memerlukan upaya menciptakan dan mewujudkan pemerataan kesempatan (*equality of opportunity*) baik dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan berusaha, pendekatan *merit* di dunia kerja, serta pemerataan di bidang-bidang pelayanan sosial lainnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki peringkat HDI adalah positif dan patut didukung karena dapat meningkatkan citra Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Pemahaman terhadap *Human Development Report* dan posisi Indonesia dalam pemeringkatan HDI dapat memungkinkan Indonesia untuk melakukan *benchmarking* dengan negara lain atas keberhasilan atau kegagalan mereka seperti digambarkan dalam pemeringkatan HDI. Pemahaman terhadap HDI juga akan dapat membantu Indonesia (para pengambil keputusan) untuk memahami berbagai cara berfikir dan pendekatan serta pengukuran indikator-indikator dalam pembangunan manusia serta pengalaman keberhasilan yang telah dicapai oleh sejumlah negara di dunia. Semakin Indonesia memahami pendekatan yang digunakan dalam HDI semakin tinggi kemampuan Indonesia melahirkan kebijakan yang tepat dan efektif dalam membangun manusia Indonesia secara komprehensif dan terukur.

HDI merupakan ukuran yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan

dengan besaran pendapatan perkapita (menu-rut kurs UD\$) dalam menentukan apakah suatu negara diidentifikasi sebagai negara maju, berkembang, atau belum berkembang. Walaupun bukan panasehat bagi peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, proses pemeringkatan HDI terbukti mampu melahirkan seperangkat rekomendasi yang sangat konsepsional, praktis sekaligus terukur bagi semua negara dalam melaksanakan program-program pembangunan manusia secara lebih efektif dan efisien mewujudkan kesejahteraan manusia di muka bumi yang lebih merata dan berkeadilan.

Pengukuran yang dilakukan dalam pemeringkatan HDI bukan semata-mata menentukan peringkat negara dalam HDI, tetapi memberikan jalan keluar bagi setiap negara dalam pembangunan kualitas manusia secara komprehensif dan jitu. HDI melakukan pengukuran indeks atas dasar asumsi bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang hidup sehat dan panjang umur, memiliki pendidikan dan kecakapan hidup yang berguna bagi kehidupan masyarakatnya, serta dapat mencapai standar hidup layak. Ketiga asumsi itu dianalisis secara konseptual dan dituangkan dalam indikator dan sub-indikator sebagai bahan dasar untuk menghitung besaran indeks pembangunan manusia (HDI).

Sebagai negara kelompok HDI menengah, Indonesia secara konsisten berada pada peringkat keenam setelah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Philipina, dan sejak tahun 2004 Indonesia dan Vietnam saling mengejar peringkat memperebutkan tempat keenam. Dalam HDI 2007, peringkat HDI Indonesia berada di bawah Vietnam walaupun Indonesia lebih tinggi dalam dua indeks sekaligus, yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks PDBpk, dan Indonesia hanya terkalahkan dalam satu indeks saja yaitu Indeks Harapan Hidup. Dalam tingkatan indikatornya, Indonesia juga mengungguli Vietnam dalam Angka Melek Aksara Dewasa (AMAD), Angka Partisipasi Kasar Gabungan (APK(Gab), dan PDB per-kapita, sedangkan Vietnam hanya unggul dalam Angka Harapan Hidup.

Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu dalam pembangunan manusia belum signifikan dampaknya terhadap posisi Indonesia dalam peringkat HDI 2007 karena dihitung berdasarkan data awal tahun 2005, dan pada waktu itu usia Kabinet ini belum genap satu semester. Dampak kebijakan Kabinet ini akan jauh lebih kentara pada peringkat Indonesia dalam HDI 2008 yang akan menggunakan data tahun 2006. Mulai tahun 2006, banyak sekali kebijakan Pemerintah yang secara potensial dapat memperbaiki peringkat HDI Indonesia, misalnya: perluasan Wajar yang didukung oleh anggaran pendidikan yang lebih besar, Gerakan Nasional Percepatan Pembeantasan Buta Aksara, pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, dan pemerataan kesempatan dalam berusaha.

Indonesia belum sepenuhnya sistematis dan terkoordinasi dengan baik dalam mengelola upaya perbaikan peringkat HDI. Data yang dilaporkan ke UNDP tentang indikator-indikator HDI masih belum terkoordinasikan dengan baik antara BPS dengan pelaksana program, sehingga data yang dilaporkan yang bersumber dari BPS hampir cenderung *underestimated* dan sering tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh departemen teknis terkait. Hal ini cenderung akan mengakibatkan posisi Indonesia dalam peringkat HDI menjadi *underestimated* pula. Oleh karena tidak ada lembaga atau kelompok kerja khusus yang menangani dan memonitor permasalahan HDI secara nasional, maka praktek-praktek *underestimasi* itu cenderung berlangsung secara terus-menerus.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas perlu dibentuk program nasional yang secara sistematis dan konsisten melakukan upaya perbaikan peringkat Indonesia dalam HDI. Pelaksanaan program tersebut merupakan tanggung jawab seluruh departemen atau lembaga non-departemen yang sehari-harinya dilaksanakan oleh sebuah lembaga pemerintah non-departemen atau kelompok kerja nasional yang sehari-harinya dibina oleh atau berkonsultasi kepada departemen atau lembaga terkait dan bertanggung jawab langsung kepa-

da Presiden. Lembaga atau Pokja tersebut bertanggungjawab dalam melaksanakan program atau kegiatan, seperti: meningkatkan pemahaman secara tuntas terhadap HDI, melakukan analisis kebijakan berkaitan dengan HDI, mengelola program dan kegiatan pemeringkatan IPM di Indonesia, memberikan rekomendasi kebijakan bagi setiap departemen atau lembaga non-departemen terkait, merencanakan, melaksanakan koordinasi antar-departemen/lembaga terkait dalam pengumpulan data, operasi *database* HDI, *review* dan pelaporan data HDI ke UNDP, serta *monitoring* upaya perbaikan peringkat HDI Indonesia setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, 1993, "*Analisis Kebijakan Pendidikan*", Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ace Suryadi, 2002, "*Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*", Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- David R. Olson and Nancy Torrance, 1998, "*The Handbook of Education and Human Development*", Blackwell Publisher Ltd.
- Haq, Mahbub Ul, 1976, "*The Poverty Curtain; Choices for The Third World*", Columbia University Press.
- Haq, Mahbub Ul, 1995, "*Reflections on Human Development: How the Focus of Development Economics Shifted from National Income Accounting to People-Centred Policies*", Oxford University Press.
- Pete Engardio., et.al, 2007, "*Chindia; How China and India Are Revolutioning Global Business*", Mc Graw-Hill.
- Sen, Amartya, 1999, "*Development as Freedom*", Random House USA Inc; 1st. Ed edition.
- UNDP, *Human Development Report*, 2000 s/d 2007
- Walter W. McMahon, 1999, "*Education and Development; Measuring the Social Benefits*", Oxford University Press.

LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL INDIKATOR DAN INDEKS HDI 207

Tabel 9: Perbandingan *Life Expectancy at Birth* di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

No	Negara	<i>Life Expectancy at Birth</i> TAHUN							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	80	80.8	81.0	81.3	81.5	82	82.2	82.3
2	Singapura	77.3	77.4	77.6	77.8	78.0	78.7	78.9	79.4
3	Brunei	75.7	75.7	75.9	76.1	76.2	76.4	76.6	76.7
4	Malaysia	72.2	72.2	72.5	72.8	73.0	73.2	73.4	73.7
5	Thailand	68.9	69.9	70.2	68.9	69.1	70.0	70.3	69.6
6	Philipina	68.6	69.0	69.3	69.5	69.8	70.4	70.7	71.0
7	Vietnam	67.8	67.8	68.2	68.6	69.0	70.5	70.8	73.7
8	Indonesia	65.6	65.8	66.2	66.2	66.6	66.8	67.2	69.7
9	Lao PDR	53.7	53.1	53.5	53.9	54.3	54.7	55.1	63.2
10	Cambodia	53.5	56.4	56.4	57.4	57.4	56.2	56.5	58.0
11	Myanmar	60.6	56.0	56.0	57.0	57.2	60.2	60.5	60.8
12	Terendah	37.9	38.3	38.9	33.4	32.7	36.9	31.3	40.9

Tertinggi : Jepang (2000-2007)

Terrendah: Siera Leone (2000-2002), Zambia (2003-2004), Zimbabwe (2005), Swaziland (2006),
Zimbabwe dan waziland (2007)**Tabel 10:** Perbandingan *Life Expectancy Index* di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

No	Negara	<i>Life Expectancy Index</i> TAHUN							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.95	0.95	0.941
2	Singapura	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.89	0.90	0.907
3	Brunei	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.862
4	Malaysia	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.81	0.811
5	Thailand	0.73	0.75	0.75	0.73	0.74	0.75	0.75	0.743
6	Philipina	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.77	0.76	0.767
7	Vietnam	0.71	0.71	0.72	0.73	0.73	0.76	0.76	0.812
8	Indonesia	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.745
9	Lao PDR	0.48	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.50	0.637
10	Cambodia	0.48	0.52	0.52	0.54	0.54	0.52	0.52	0.550
11	Myanmar	0.59	0.52	0.52	0.53	0.54	0.59	0.59	0.596
12	Terendah	0.22	0.22	0.23	0.16	0.13	0,12	0.1	0.28

Tertinggi: Jepang dan Hongkong (2000, 2001, 2006), Jepang(2004, 2006)

Terrendah: Swaziland (2000-2004, 2005-2007), Zambia (2004)

Tabel 11: Perbandingan Education Index di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

NO	Negara	<i>Education Index</i> TAHUN							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.993
2	Singapura	0.86	0.87	0.87	0.87	0.91	0.91	0.91	0.908
3	Brunei	0.84	0.86	0.86	0.89	0.87	0.86	0.88	0.877
4	Malaysia	0.79	0.80	0.80	0.83	0.83	0.83	0.84	0.839
5	Thailand	0.84	0.84	0.84	0.88	0.86	0.86	0.86	0.855
6	Philipina	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.888
7	Vietnam	0.83	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.815
8	Indonesia	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.83	0.830
9	Lao PDR	0.50	0.51	0.52	0.63	0.64	0.66	0.66	0.663
10	Cambodia	0.64	0.66	0.66	0.64	0.66	0.69	0.69	0.691
11	Myanmar	0.75	0.75	0.75	0.72	0.73	0.76	0.76	0.764
12	Terendah	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.23	0.267

Tertinggi: Norway, Sweden, Austria, Netherland, Berlium, UK, Finland, New Zealand (2000- 2004), Australia, Ireland, Finland, Netherland, Austria, New Zealand (2005); Terendah: Niger (2000-2003, 2007), Burkina Faso (2004-2006),

Tabel 12: Perbandingan Angka Melek Aksara Dewasa (AMAD) di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

No	Negara	<i>Angka Melek Aksara Dewasa</i> TAHUN							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
2	Singapura	91.8	92.1	92.3	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
3	Brunei	90.7	91.0	91.5	91.6	93.9	92.7	92.7	92.7
4	Malaysia	86.4	87.0	87.5	87.9	88.7	88.7	88.7	88.7
5	Thailand	95.0	95.3	95.5	95.7	92.6	92.6	92.6	92.6
6	Philipina	94.8	95.1	95.3	95.1	92.6	92.6	92.6	92.6
7	Vietnam	92.9	93.1	93.4	92.7	90.3	90.3	90.3	90.3
8	Indonesia	85.7	86.3	86.9	87.3	87.9	87.9	90.4	90.4
9	Lao PDR	46.1	47.3	48.7	65.6	66.4	68.7	68.7	68.7
10	Cambodia	65.0	68.2	67.8	68.7	69.4	73.6	73.6	73.6
11	Myanmar	84.1	84.4	84.7	85.0	85.3	89.7	89.9	89.9
12	Terendah	14.7	15.3	15.9	16.5	12.8	12.8	21.8	23.6

Tertinggi: Noorway, Iceland, Australia, Ireland, Sweden, Canada, Japan, United States, Switzerland, Netherland, Luxemburg, Belgium, Austria, Denmark, United Kingdom, France, Finland, New Zealand, Germany
Terrendah: Burkina Faso (2000-2007)

Tabel 13: Perbandingan Indikator Gabungan APK di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

No	Negara	<i>Indikator Gabungan APK TAHUN</i>							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	114	116	116	114	114	123	113	113.0
2	Singapura	73	75	75	75	87	87	87	87.3
3	Brunei	72	76	76	83	73	74	77	77.7
4	Malaysia	65	66	66	72	70	71	73	74.3
5	Thailand	61	60	60	72	73	73	74	71,2
6	Philipina	83	82	82	80	81	82	82	81.1
7	Vietnam	63	67	67	64	64	64	63	63.9
8	Indonesia	65	65	65	64	65	66	68	68.2
9	Lao PDR	57	58	58	57	59	61	61	61.5
10	Cambodia	61	62	62	55	59	59	60	60.0
11	Myanmar	56	55	55	47	48	48	49	49.5
12	Terendah	15	16	16	17	19	21	21	22.7

Tertinggi: Australia (2000-2004, 2006, 2007), Sweden (2004), UK (2005),
Terendah; Nigeria (2000-2007)

Tabel 14: Perbandingan GDP Perkapita di antara Negara-negara Anggota ASEAN, HDI 2000-2007

No	Negara	<i>GDP Perkapita TAHUN</i>							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Tertinggi	33,505	42,769	50,061	53,780	61,190	62,298	69,961	60,228
2	Singapura	24,210	20,767	23,356	22,680	24,040	24,481	28,077	29,663
3	Brunei	16,765	17,868	16,779	19,210	19,210	19,210	19,210	28,161
4	Malaysia	8,137	8,209	9,068	8,750	9,120	9,512	10,276	10,882
5	Thailand	5,456	6,132	6,402	6,400	7,010	7,595	8,090	8,667
6	Philipina	3,555	3,805	3,971	3,840	4,170	4,321	4,614	5,137
7	Vietnam	1,689	1,860	1,996	2,070	2,300	2,490	2,745	3,071
8	Indonesia	2,651	2,857	3,043	2,940	3,230	3,361	3,609	3,843
9	Lao PDR	1,734	1,471	1,575	1,620	1,720	1,759	1,945	2,039
10	Cambodia	1,257	1,361	1,446	1,860	2,060	2,078	2,423	2,727
11	Myanmar	1,199	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027
12	Terendah	458	448	490	470	520	548	561	667

Tertinggi: Luxemburg (2000-2007); Terendah: Siera Leone (2000-2006), Malawi (2007)